



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ELI JUMAELI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 664767

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/200 m2 di KOTA CILEGON ,  
HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 4000 m2 di LEBAK, HASIL SENDIRI Rp.  
300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 5.000.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.  
5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 958.000.000

**III. HUTANG** Rp. 120.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 838.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IRFAN ALFI  
2. Jabatan : KETUA  
3. NHK : 648081

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	1.250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/11 m2 di KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/18 m2 di SERANG, WARISAN Rp. 800.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	25.000.000
1. MOTOR, VESPA PX Tahun 1983, WARISAN Rp. 25.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	12.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	1.287.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	70.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	1.217.000.000

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MULYA MANSUR  
NIK : 3672042405800001  
Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
Unit Kerja : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
Sub Unit Kerja : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON  
Jabatan : ANGGOTA  
Jenis Laporan : Periodik - 2021  
Tanggal Kirim : 18 Januari 2022

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.





Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : PATCHURROHMAN  
NIK : 3672011203760002  
Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
Unit Kerja : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
Sub Unit Kerja : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON  
Jabatan : ANGGOTA  
Jenis Laporan : Periodik - 2021  
Tanggal Kirim : 11 Februari 2022

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : PATCHURROHMAN  
NIK : 3672011203760002  
Lembaga : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
Unit Kerja : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
Sub Unit Kerja : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON  
Jabatan : ANGGOTA  
Jenis Laporan : Periodik - 2021  
Tanggal Kirim : 11 Februari 2022

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SEHABUDIN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 753530

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 880.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m<sup>2</sup>/164 m<sup>2</sup> di KOTA CILEGON ,  
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m<sup>2</sup>/325 m<sup>2</sup> di KOTA CILEGON ,  
HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m<sup>2</sup>/82 m<sup>2</sup> di KOTA CILEGON ,  
HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 106.000.000

1. MOTOR, HONDA AUTOMATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.  
6.000.000
2. MOBIL, BRIO E Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 9.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 200.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

**Sub Total**

Rp. 995.200.000

**III. HUTANG**

Rp. 120.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 875.200.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.